

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andrianto. N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang: Bayumedia Publishing
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Bintarto.R,1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*.Jakarta : Ghalia Indonesia
- Daldjoeni,N.1986. *Geografi Kota – Desa* . Bandung : Alumni
- Davis, B, Gordon .1991. *Sistem informasi manajemen*. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Dusseldorf. D.B.W.M., 1981, *Participation inPlanned Development Influenced by Governments Of Developing Countries atLocal Level in Rural Areas*, Wageningen:Agri-cultural University.
- Esterberg, Kristin G,2002 ; *Qualitative Methods Ins Social Research*, McGraw Hill, New York
- Gunawan, A.W., dkk. (2008). *7 Langkah Literasi Informasi: Knowledge Management*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Isbandi,R., 2007, *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, UI Press,Jakarta.

- Jogiyanto, HM. 2005. Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan. Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset
- Koentjaraningrat, 1994. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Pengantar Ilmu Antropologi, cetakan kedelapan. Jakarta
- Leibo Jefta. (1995). Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda). Yogyakarta: Andi Offset.
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mikkelsen, Britha. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Mukhtar. (2013). Metode penelitian deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Sabarno. H. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika
- Sakapurnama, Eko, Lina Miftahul J, dkk. (2011). Telaah Implementasi UU KIP sebagai Wujud Penerapan Good Governance: Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta. Laporan Penelitian. Universitas Indonesia.
- Sarundajang, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto., Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subbag Hukum BPK 2015, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwakilan Provinsi NTT.

(<http://Kupang.Bpk.Go.Id/WpContent/Uploads/2015/02/KewenanganPemerintah-Desa-Dalam-Mendirikan.pdf>)

Suharno, Djazuli, H.M. Tri, 2006. Keterbukaan Dan Keadilan. Indonesia: PT Ghalia.

T. Coser dan Anthony Rosenberg. 1976. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall.

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

West, Richard dan Lynn H. Turner, (2008), Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Wilcox, David. 1994. The Guide to Effective Participation. London: Delta Press

Yuwono , Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan paradigma Baru : Universitas Negeri Malang . UH Press.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang, Pemerintah Daerah